



Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Edisi 1 Tahun 2018

Pendopo Agung Bung Karno

Bentuk Persembahan untuk Rakyat Salatiga

- Sekilas Penyelenggaraan PEMILU 2019
- Membedah Raperda Inisiatif Dewan

ISSN : 2502-4817



9 772502 481007

Diterbitkan oleh :
Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga

RAPERDA



Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga di Ruang Kerja Ketua DPRD Salatiga

Anjongsana KAJARI ke Kantor Dewan

DPRD Salatiga - Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga Dr. Yudi Krisiana, SH. MH. Beranjongsana ke Kantor DPRD Kota Salatiga, Senin (12/3/2017). Dalam kunjungannya, Kajari diterima langsung oleh Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE serta Wakil Ketua M. Fathur Rachman, SE. MM dan Ir. Hj. Diah Sunarsasi di ruang kerja Pimpinan. Turut mendampingi segenap Ketua Komisi beserta Kepala Sekretariat DPRD Sri Wityowati, SE.

Perlu diketahui bahwa Dr. Yudi Kristiana kini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga menggantikan Bambang Setyadi yang sekarang promosi menjadi Asisten Intelejen Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.

Saat anjongsana ke DPRD, Dr. Yudi Kristiana berharap kehadirannya di Kota Salatiga sebagai Kepala Kejaksaan yang baru tidak menakutkan akan tetapi bisa menjadi sahabat diskusi masalah hukum. Hal tersebut juga disampaikan saat memberikan sambutan pada lepas sambut Kajari Salatiga di Ruang Kaloka Gedung Setda Kota Salatiga, 7/3 malam.

Ketua DPRD M. Teddy Sulistio SE menyampaikan bahwa Kota Salatiga merupakan kota yang unik. Berbagai suku bangsa dan agama ada di Kota Salatiga. "Kondisi masyarakat yang beragam dari berbagai suku, bahasa, dan agama di Indonesia bisa hidup rukun di Salatiga," kata Ketua DPRD Kota Salatiga. (ss/ss).



Pencurian Motor Meresahkan Warga Salatiga

Beberapa waktu yang lalu sering terjadi pencurian sepeda motor di wilayah kota Salatiga, hal ini sangat meresahkan warga masyarakat.

Pelaku kejahatan ini tidak hanya beroperasi dengan modus membegal di jalan tapi juga ada yang beroperasi dengan cara mencongkel pintu dan jendela rumah korban untuk mengambil motor ataupun harta korban.

Bahkan menjelang Lebaran kemarin di wilayah Perum Prajamukti Sidomukti terjadi kejadian curanmor secara beruntun dengan kerugian lebih dari tiga motor.

Kawasan sepanjang Jalan Lingkar Salatiga (JLS) yang saat malam hari sangat sepi dan minim penerangan jalan sering kali dijadikan sasaran para kriminal untuk melakukan aksi kejahatan mereka.

Selain peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, juga mohon sekiranya aparat berwenang untuk lebih meningkatkan patroli terutama di wilayah yang rawan terjadi tindak kriminal.

Kita juga memohon Pemerintah Kota Salatiga untuk memberikan lebih untuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di wilayah yang masih minim penerangan untuk meminimalisir tindak kejahatan. Bersama warga dan aparat keamanan mari kita jaga Kota Salatiga untuk tetap aman dan kondusif. (ss)

Pujo, Sidomukti - Salatiga

PPDB Sistem Zonasi Pemerataan Kualitas Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Salatiga menerapkan Sistem Zonasi PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) pada tahun 2018 ini. Sistem Zonasi yang mengatur pendaftaran anak di sekolah terdekat atau dalam zonasi tempat tinggal yang ditentukan.

Pertimbangan sarana prasarana sekolah yang berlabel favorit lebih memadai menjadi pertimbangan beberapa wali murid. Walaupun mungkin jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal namun kami rela untuk memperoleh pendidikan terbaik bagi putra kami.

Saya dan sebagian wali murid menjadi khawatir anak kami tidak bisa mendaftar di sekolah favoritnya karena domisili kami berada di zona berbeda dengan letak sekolahnya.

Dengan sistem ini, anak yang memperoleh nilai yang bagus belum tentu bisa masuk sekolah favorit walaupun selama ini anak kami telah berusaha keras belajar untuk bisa diterima di sekolah tersebut.

Mohon sekiranya Dinas Pendidikan Kota Salatiga bisa meninjau kembali kebijakan ini agar tidak merugikan peserta didik dan orang tua murid, walaupun mungkin kebijakan ini mungkin bagus untuk pemerataan kualitas pendidikan di Kota Salatiga. (ss)

*Diyan warga Kembangarum
Kota Salatiga*

Karikatur

perlindungan hukum

Oleh: Mbah Gatot R
dagelan PUNAKAWAN





Daftar Isi

- 4 **Redaksi:** Pemilu 2019 Pemilihan Umum Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia
- 5 **Mimbar:** Pendopo Agung Bung Karno bentuk persembahan untuk Rakyat Salatiga
- 9 **Artikel:** Menjaring aspirasi melalui situs atau website DPRD (sebuah alternatif)
- 12 **Wacana:** Membangun bangsa dengan membaca
- 14 **Laporan Utama:** Sekilas penyelenggaraan Pemilu 2019; Penataan Lingkungan dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan; Harus disiapkan pengelolaan dan penataan wilayah; Alokasi dana APBD dukung penanggulangan bencana alam; Satuan Polisi Pamong Praja pentingnya patroli dan pemetaan daerah rawan bencana; Bantuan hukum warga tidak mampu butuh landasan hukum yang kuat.
- 26 **Opini:** Pagelaran budaya di Taman Mini media promosi Salatiga
- 28 **Warta:** Seputar Kegiatan Kota Salatiga.
- 33 **Profil:** Adi Riafik belajar hidup dari daun dan sampah.
- 34 **Rileks:** Tebak Wajah Jiwaraga 38.
- 34 **Lensa:** DPRD Kota Pekalongan ke Salatiga.

PEMILU 2019

Pemilihan Umum Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia

Pemilu 2019 adalah puncak pesta demokrasi 5 tahunan di Negara Republik Indonesia. Pemilu tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 guna memilih para anggota dewan legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD serta akan memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk menstabilkan hubungan antara Eksekutif dan Legislatif dalam suatu negara demokrasi dibuatlah ambang batas parlemen yang disebut *parliamentary threshold*.

Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah batas suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk ikut dalam penentuan perolehan kursi di DPR. Adapun metode konversi suara menggunakan *sainte league* (metoda hitung dengan bilangan pembagi) murni. Mari kita sukseskan Pemilihan Umum 2019 yang merupakan puncak demokrasi rakyat di negara kita tercinta ini. (ss)



Redaksi

Diterbitkan oleh : **SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA.**
PENASEHAT : Ketua DPRD, M. Teddy Sulistio, SE; Wakil Ketua DPRD, M. Fathur Rahman, SE., MM; **PEMBINA :** Wakil Ketua DPRD, Ir. Hj. Diah Sunarsasi; **PENGARAH :** Sekretaris DPRD : Sri Wityowati, SE; **PEMIMPIN REDAKSI :** Kepala Bagian Umum, Dra. Siti Nur Sholikhah; **REDAKTUR PELAKSANA :** Kepala Sub Bagian Humas dan Rumah Tangga, Budi Susilo, S.Sos; **KOORDINATOR LIPUTAN :** Kepala Sub Bagian TU dan Kepegawaian, Ady Indiasari, S.Sos; **PELIPUT/PENYUNTING :** Andy Wijayanto, S.Kom; Lukman Fahmi, S.HI; Dwi Kadarsih; Devyna Kristiyani; Sudibyo Budi Susanto, A.Md; Fatih Ashthifani; Lintang Ayu Dian Pangarsi; **SETTING & LAY OUT :** Putra Karya Offset; **DISTRIBUSI :** Udiono, Kusno dan distributor Kelurahan se-Kota Salatiga; **ALAMAT REDAKSI :** SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA, Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674.

Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah yang dilengkapi foto dialamatkan ke Humas Sekretariat DPRD Kota Salatiga Jl. Letjend. Sukowati 51 Salatiga, atau ke email: majalahjiwaraga@gmail.com. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.



Pendopo Agung Bung Karno

Bentuk Persembahan untuk Rakyat Salatiga

Foto: Andy

Prosesi peletakan batu pertama pembangunan Pendopo Agung Bung Karno.



Bung Teddy

Ketua DPRD Kota Salatiga M. Teddy Sulistio, SE menyatakan bahwa DPRD Kota Salatiga sedang mempersiapkan pembangunan Pendopo Agung Bung Karno yang akan didirikan di depan Gedung Wakil Rakyat Jl Letjen Sukowati Salatiga.

Menurut beliau pendapa tersebut dibangun sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sang proklamator yang merupakan arsitek utama bagi Bangsa Indonesia, yakni Ir Soekarno.

Pendapa berbentuk joglo yang merupakan ciri khas rumah jawa tersebut, akan menjadi pusat kegiatan masyarakat Kota Salatiga, karena siapa saja bisa menggunakannya. Lokasi pendapa akan menempati Kantor Satpol PP sekarang sudah dipindah ke bagian lain kompleks Pemkot Salatiga. Menurut Ketua DPRD, di salah satu sudut Pendopo Agung Bung Karno tersebut juga akan dilengkapi dengan gamelan slendro pelog yang diberi nama "Kyai Bhinneka Tunggal Ika".

"Pendapa Agung Bung Karno ini dibangun sebagai persembahan untuk rakyat dan sebagai pusat aktivitas masyarakat. Pendapa akan menjadi

arena kegiatan masyarakat Kota Salatiga dalam berbagai bentuk, mulai dari seni, hiburan, seminar, dan lainnya." kata Ketua DPRD Kota Salatiga yang akrab dipanggil Bung Teddy.

Rencananya Pendapa Agung Bung Karno akan memiliki empat tiang utama sebagai soko seperti layaknya bangunan tradisional jawa lainnya. Tiang soko pendapa yang akan dibangun bukan dari beton (semen) melainkan dari kayu jati utuh, sehingga bisa mempercantik joglo atau pendapa itu. Rumah joglo itu dibangun dengan ukuran besar, sehingga bisa menampung lebih banyak warga yang datang. Pendapa juga dilengkapi dengan berbagai oramen ukiran khas jawa, sehingga benar-benar menunjukkan khas bangunan tradisional Jawa

Menurut Bung Teddy, pendapa adalah salah satu solusi, perlu adanya sebuah tempat yang representatif bagi warga Kota Salatiga untuk melakukan berbagai aktivitas. "Memang banyak bangunan di Kota Salatiga yang bisa dipakai, tetapi sangat perlu adanya sebuah tempat pertemuan tertentu yang merupakan area publik dan lebih dekat dengan warga" tutur Ketua DPRD Salatiga.

Area Publik dan Pentas Seni

Tempat yang layak dijadikan sebagai area publik di Kota Salatiga yang berada sekitar Gedung DPRD Kota Salatiga tersebut akan sangat bermanfaat bagi warga Salatiga, karena selama ini Kantor DPRD Kota Salatiga telah membuka ruang

yang luas kepada masyarakat dengan memfasilitasi dan menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Selama ini Kantor DPRD Salatiga kerap digunakan berbagai kegiatan dengan masyarakat dalam jumlah besar, sehingga tidak bisa dilakukan di ruang sidang DPRD atau ruang pertemuan lainnya, namun dilakukan di halaman Gedung Dewan. Akhirnya kegiatan kemasyarakatan seperti pentas seni dan wayang kerap dilakukan di halaman Gedung DPRD dengan memasang tenda.

“Agar lebih praktis dan menghemat anggaran, maka perlu adanya gedung pertemuan baru yang lebih luas, dan teretuslah Pendapa Agung Bung Karno. Penggunaan pendapa itu pun tidak dipungut biaya. alias gratis bagi masyarakat”, tutur Bung Teddy.

Sesuai dengan perencanaan pembangunannya, Pendapa Agung Bung Karno akan dibangun dengan anggaran APBD tahun 2018. Rencananya pembangunan akan meliputi proses koordinasi pelepasan aset bulan Januari sampai dengan Februari, pembentukan pengelola kegiatan bulan Februari, persiapan dokumen lelang bulan Februari sampai dengan bulan Maret, proses pembongkaran bulan April dan proses pembangunannya bulan Mei sampai dengan bulan Nopember 2018. Untuk pembangunan pendapa sendiri akan selesai pada bulan Desember 2018.

Patung Bung Karno

Pendapa Agung Bung Karno tersebut akan dilengkapi sebuah patung berukuran besar. Sesuai dengan nama pendapa, patung yang disiapkan adalah patung Ir. Soekarno atau Bung Karno. Patung Bung Karno disiapkan sedemikian rupa sehingga akan menjadi simbol Bangsa Indonesia untuk menjaga semangat perjuangan dalam meneruskan cita-cita kemerdekaan dan kesejahteraan bangsa.

Rencananya pembuatan patung Bung Karno akan melibatkan I Nyoman Nuarta, seorang pematung asal Bali yang sudah terkenal dengan berbagai karya seninya.

“Saya sudah bertemu dengan I Nyoman Nuarta dan berdialog serta meminta dibuatkan Patung Bung Karno. Patung Bung Karno akan kita tempatkan di depan pendapa agung.” kata Ketua DPRD Kota Salatiga Teddy Sulistio SE.

Menurutnya, kehadiran Pendapa Agung Bung Karno yang diperuntukkan bagi masyarakat tersebut akan semakin menjadikan kompleks DPRD Salatiga benar-benar menjadi rumah rakyat. Ketika rumah rakyat tersebut dijadikan berbagai aktivitas kemasyarakatan, maka akan muncul berbagai ide untuk memajukan Kota Salatiga.

“Kemajuan Kota Salatiga, berarti kemajuan peradaban bagi masyarakat ke depan sehingga dapat memicu semangat masyarakat untuk membangun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kita” ungkap Bung Teddy.

Ikon Salatiga

Pendapa Agung Bung Karno tentunya akan menjadi salah satu ikon Kota Salatiga. Pendapa yang dilengkapi dengan Patung Bung Karno itu pun diharapkan kelak menjadi objek wisata dan tempat



Ketua DPRD saat meletakkan batu pertama.

kegiatan masyarakat Kota Salatiga atau pun bagi para pelancong.

Pendapa akan dibuka 24 jam untuk masyarakat, baik untuk kegiatan atau sekadar untuk berkunjung. Daya tarik pendapa ini diharapkan semakin mengenalkan Kota Salatiga.

Lebih jauh Bung Teddy mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan DPRD membangun ikon baru di kompleks kantor wakil rakyat tersebut merupakan bukti bahwa komitmen kerja DPRD untuk masyarakat merupakan tujuan utama.

Pembangunan Kota Salatiga yang telah dianggarkan dalam APBD 2018 dan telah dikonsepsi oleh wakil rakyat bersama eksekutif tersebut sudah pasti berpihak pada kepentingan masyarakat.

Tidak hanya pembangunan Pendapa Agung Bung Karno saja, sejumlah alokasi anggaran lainnya telah disiapkan untuk pembangunannya.

“Semua berorientasi kepada kepentingan masyarakat, dengan begitu kami meminta agar masyarakat mengawasi seluruh kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, karena peran masyarakat sangat penting, terlebih tahun 2018-2019 merupakan tahun politik, sehingga perlu peran warga dalam ikut mengawasi pembangunan kota” tutup Bung Teddy. (ss/ss).



PENDOPO AGUNG BUNG KARNO sebagai Ruang Aspirasi

Foto: Andy

M. Fathur Rahman, SE. MM

Bertepatan peringatan Hari Jadi ke-1268 Salatiga, pembangunan Pendapa Agung Bung Karno di Komplek Kantor DPRD Salatiga dimulai dengan peletakan batu pertama. Dengan dibangunnya Pendapa Bung Karno nantinya, warga dan seluruh masyarakat Kota Salatiga akan memiliki wadah maupun tempat untuk beraktivitas mengekspresikan jati diri bangsa serta sebagai ruang untuk menyampaikan aspirasinya.

Pembangunan pendapa ini karena DPRD merasa kesulitan menyambut atau menerima kehadiran masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau mengadakan kegiatan di lingkungan gedung DPRD Kota Salatiga. Banyak aktivitas masyarakat mengadakan berbagai event bekerja sama dengan DPRD, seperti pameran, pertunjukan seni dan hiburan, bazar dan lainnya.

Dalam waktu tidak lama lagi Kota Salatiga Akan memiliki Pendapa Agung Bung Karno. Bangunan ini akan dibangun di samping Kantor DPRD Kota Salatiga. Proses pembangunan telah dimulai dengan ditandai Peletakan batu pertama, oleh DPR RI Juliari P Batubara, Ketua DPRD Teddy Sulistio, Walikota Salatiga Yuliyanto, dan didampingi Forkopimda. Sengaja peletakan batu pertama dilaksanakan tepat dengan Peringatan HUT ke 1.268 Kota Salatiga, di halaman gedung wakil rakyat, Selasa (24/7) siang. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa bangunan ini nantinya diperuntukkan untuk warga Salatiga.

M. Fathurrahman menanggapi positif terkait dengan dibangunnya Pendapa Agung Bung Karno ini. "Selama ini kita melakukan reses setiap tahun dan menggunakan waktu berkala. Sehingga proses

penyampaian aspirasi oleh masyarakat ke anggota dewan harus menyesuaikan waktu tersebut. Meskipun ada juga masyarakat yang datang langsung ke rumah kami para anggota dewan, namun hanya bisa dihitung dengan jari," tuturnya.

"Dengan adanya ruang terbuka bagi masyarakat akan memudahkan mereka untuk menyampaikan aspirasinya. Jika selama ini banyak warga atau mahasiswa yang datang dengan rombongan banyak hanya bisa diterima di teras. Dengan adanya Pendapa Agung Bung Karno, warga tidak lagi harus berpanas-panas menunggu tanggapan dan jawaban para anggota dewan. Mereka bisa diterima di pendapa tersebut, ini artinya kita menghargai mereka yang mewakili kita untuk memperjuangkan aspirasinya" imbuh M Fathurrahman.

Dilihat dari rencana pembangunan nilai pagu pendapa agung senilai Rp 4,5 miliar. Luas pendapa 14 meter x 14 meter, dengan ukuran tiang soko 40 cm x 40 cm. "Pendapa Agung Bung Karno dibangun dengan atap tumpangsari sekelas pendapa kadipaten.

"Dengan dibangunnya pendapa agung yang representatif dengan bentuk khas joglo Jawa dengan tiang soko guru menggunakan kayu jati utuh menambah khas Jawa yang kental. Menurut informasi pendapa akan dihiasi dengan patung Proklamator Kemerdekaan RI, Ir Soekarno, setinggi 3 meter. Harapannya akan menambah nyaman bagi warga yang melakukan aktifitas di sana kelak," tambah M. Fathurrahman.

"Harapan kami pendapa agung akan dijadikan pusat kegiatan masyarakat di berbagai bidang mulai dari seminar, workshop, seni dan hiburan, pesta rakyat, pameran, bazar, pasar kuliner, lomba bagi siswa, dan kegiatan lainnya. Dan yang terpenting adalah adanya ruang penyampaian aspirasi yang terbuka bagi warga," pungkas M. Fathurrahman. (lx/ss)

Prihatin Prestasi Sepak Bola di Kota Salatiga

Salatiga tak pernah absen menyumbang pemain sepak bola terbaik untuk membela timnas Indonesia. Kita dulunya mengenal nama Bambang Pamungkas.

Berbicara mengenai Salatiga dan sepak bolanya, tentu perlu untuk menyebut lapangan Ngebul. Lapangan sederhana, yang bukan level internasional inilah yang menjadi arena bakat-bakat muda terbaik untuk mengembangkan diri.

Tak hanya pemain Salatiga, mereka yang berlatih di Ngebul juga datang dari berbagai kota di Jawa Tengah maupun kota lain di Indonesia.

Semuanya bermula pada tahun 1963 ketika di jalan Veteran 45 Salatiga, itu berdiri bangunan yang berfungsi sebagai mess untuk pembinaan pemain muda berbakat. Dulunya disebut sebagai Training Center (TC) Ngebul. Ngebul merupakan nama kawasan yang dipilih sebagai tempat pembinaan karena areanya sejuk dan jauh dari keramaian.

TC Ngebul ini didirikan bersama oleh PSSI dan Departemen Olahraga. Baru pada 1973, namanya berganti menjadi Diklat Salatiga. Nama ini yang kemudian menjadi sangat populer hingga kini tinggal menjadi kenangan.

Pergantian nama itu juga berimplikasi pada format pembinaan menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan (Diklat). Kosasih Poerwanegara, ketua PSSI saat itu menjalin kerjasama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) untuk menyediakan guru-guru yang difungsikan sebagai mentor belajar para atlet muda.

Di Salatiga, dikenal ada sekolah yang jadi rujukan para atlet Diklat Salatiga ini seperti SMP N 3 Salatiga, SMA N 1 Salatiga, SMA N 2 Salatiga, dan SMA N 3 Salatiga.

Beberapa bulan lalu dua kesebelasan asal Kota Semarang Tugu Muda SMG (KU 2008) dan Mitra Semarang (KU 2007), masing-masing meraih juara 1 Turnamen Sepak Bola Usia Dini Piala Walikota Salatiga, yang berlangsung di Lapangan Yonif Mekanis 411/Kostrad, Jumat (30/3) hingga Minggu (1/4).

Club lain yang berhak mendapatkan piala adalah: untuk KU 2007 juara II Bonansa Solo, juara III Pesat Karang Anyar dan Juara IV Satrio Pandowo Klaten. Adapun Untuk KU 2008 Juara II diraih SKB Salatiga, Juara III SSS Semarang dan juara IV Baracuda Semarang.

Penyerahan trofi turnamen yang dilaksanakan oleh pejabat BRI, Wakil Komandan Yonif Mekanis



Riawan Woro Endartiningrum, SE

Raider 411/Pandawa Mayor Invanteri Ardiansyah Siregar, Khamim Kabid PNF Disdik Salatiga pada Dinas Pendidikan, Joko Haryono Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala SKB Salatiga Ina Siah dan Wawali Muh Haris sesaat setelah partai final usai.

Para juara mendapatkan uang pembinaan piala tetap dan sertifikat. Untuk juara I mendapat uang pembinaan 3 juta rupiah, juara II mendapatkan 2 juta rupiah, juara III 1 juta rupiah dan juara IV 500 ribu rupiah.

Menanggapi berita tersebut Riawan Woro E. mengaku prihatin atas prestasi sekolah sepak bola yang ada di Kota Salatiga. "Kota Salatiga sudah terkenal sebagai daerah pencetak atlet sepak bola, oleh karenanya jika sekolah sepak bola yang ada kurang berprestasi tentu butuh perhatian khusus dari pemerintah," demikian Riawan Woro E. menanggapi hal tersebut.

"Meskipun diklat sepak bola Provinsi Jawa Tengah sudah pindah dari Salatiga ke Semarang, jangan sampai Kota Salatiga tidak mencetak pemain nasional. Banyak keuntungan Salatiga dari letak geografis dan iklim yang mendukung terbentuknya atlet yang handal. Dengan demikian penting bagi Pemkot Salatiga untuk memberikan perhatian terhadap sekolah-sekolah sepak bola yang ada di kota ini," tekan Riawan Woro E.

"Perhatian pemerintah terhadap sekolah bisa dengan memberikan fasilitas lapangan bola yang layak. Hingga saat ini Kota Salatiga belum memiliki stadion ataupun lapangan sepak bola yang nyaman untuk bermain. Semoga dengan rencana Pemkot Salatiga membangun Stadion mini di 4 kecamatan yang ada mampu membantu sekolah sepak bola dalam berlatih," imbunya. (lux/ss)

Menjaring Aspirasi Melalui Situs atau Website DPRD (Sebuah Alternatif)

Oleh : Lintang Ayu Dian Pangarsi, S.Kom *)



Situs/website resmi DPRD Kota Salatiga

Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD merupakan salah satu program kerja dan kegiatan pokok anggota DPRD sesuai daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota DPRD. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan reses guna memperoleh masukan-masukan serta untuk menyerap dan atau menjaring aspirasi masyarakat/konstituennya di masing-masing daerah pemilihan. Aspirasi masyarakat tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada pihak eksekutif untuk ditindaklanjuti dan menjadi bahan penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun Anggaran berikutnya.

Hasil kegiatan reses anggota DPRD tersebut akan dituangkan dalam bentuk POKOK-POKOK PIKIRAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diserahkan langsung kepada Walikota melalui Bappeda kabupaten/Kota sebagai bahan masukan awal dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kota tersebut.

Pokok-pokok pikiran DPRD yang meliputi seluruh bidang pembangunan dan urusan kewenangan pemerintah daerah, permasalahan yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil aspirasi berdasarkan demonstrasi komponen masyarakat serta hasil-hasil studi banding DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk permasalahan yang berkembang di masyarakat saat ini, jika Kabupaten/Kota tersebut memiliki situs atau website, maka anggota DPRD

yang bersangkutan akan dapat mengambil informasi-informasi dari situs tersebut.

Maka dari itu, idealnya sebuah situs atau website DPRD bersifat dinamis. Yaitu isi informasi website tersebut selalu berubah-ubah, dan isi informasinya bersifat interaktif dua arah yang berasal dari pemilik serta pengguna website, sehingga tidak hanya DPRD saja yang memasukkan data informasi, melainkan penggunapun juga dapat memberikan informasi kepada Anggota DPRD guna menyampaikan aspirasinya.

Guna menarik masyarakat agar membuka situs atau website DPRD, seyogyanya selain menampilkan informasi data teks, situs atau website DPRD bias dilengkapi dengan data gambar diam dan gambar gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya. Tampilan informasi tersebut harus dibuat dalam satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).

Pengembangan Situs/website

Situs atau website DPRD Kota Salatiga yaitu <http://dprd-salatigakota.go.id/> setiap tahun selalu dikembangkan kearah yang lebih baik. Hal ini merupakan salah satu dari kewajiban Sekretariat DPRD Salatiga guna memfasilitasi anggota DPRD sebagai badan publik untuk membuka akses informasi bagi masyarakat, kecuali beberapa informasi tertentu, yang diatur dalam Undang-



isi situs/website DPRD Kota Salatiga.

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU tersebut juga menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Hal tersebut dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, yang dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengembangan situs atau website DPRD Kota Salatiga sebagai sarana publikasi kegiatan dan informasi bagi masyarakat ini mutlak harus dilaksanakan, karena modul-modul yang dikembangkan akan dapat meningkatkan fungsionalitas situs atau website itu sendiri. Keberadaan sebuah situs atau website tidak akan berguna tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat atau pengunjung internet. Dengan begitu pengembangan situs/website DPRD Salatiga selain meningkatkan fungsionalitas juga bertujuan agar situs tersebut sering dikunjungi atau dikenal masyarakat, karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besarnya pengunjung dan komentar yang masuk. Selain itu Humas Sekretariat DPRD Kota salatiga juga berkewajiban mengenalkan situs/website DPRD kepada masyarakat melalui publikasi dan promosi.

Publikasi situs/website DPRD Salatiga kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pamlet-pamlet, selebaran, baliho, majalah Jiwaraga dan lain sebagainya meskipun cara ini bias dibilang masih kurang efektif dan sangat terbatas. Untuk lebih efektifnya, Humas Sekretariat DPRD Salatiga juga harus mempublikasikan secara langsung di internet melalui search engine-search engine atau mesin pencari, seperti Yahoo, Google, MSN, Search Indonesia, dan sejenisnya. Hal ini sangat efektif, karena publikasi ini tidak terbatas ruang atau waktu.

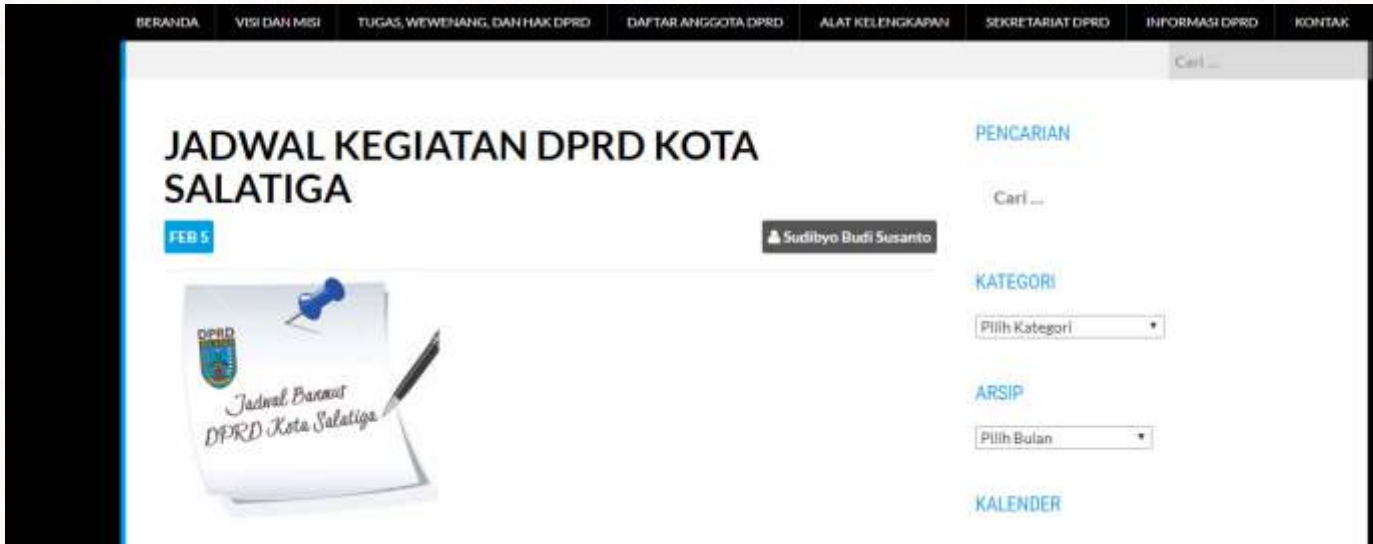
Cara publikasi di search engine ada yang gratis dan ada pula yang membayar. Yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama untuk bisa masuk dan dikenali di search engine terkenal seperti Yahoo atau Google. Cara efektif publikasi adalah dengan membayar, walaupun harus sedikit mengeluarkan dana namun situs/website akan cepat masuk ke search engine dan dapat segera dikenal oleh pengunjung.

Penggunaan Bahasa Program

Jenis bahasa program yang digunakan dalam website atau situs untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website pada saat diakses sangat menentukan interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka website tersebut akan terlihat semakin interaktif serta terlihat bagus.

Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas website. Jenis bahasa program yang banyak dipakai desainer website antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets, XML, Ajax dan sebagainya. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan update setiap saat.

Guna melakukan update situs/website DPRD Kota Salatiga, Humas Sekretariat DPRD membagi beberapa tingkatan pengguna situs/website tersebut. Adapun tingkatan pengguna untuk mengakses website DPRD Kota Salatiga adalah Publik, Kontributor dan Administrator. Publik merupakan pengunjung yang mengakses website DPRD Kota Salatiga melalui alamat dprd-



Jadwal Banmus DPRD bisa diakses di Website DPRD.

salatigakota.go.id. Kontributor adalah pengguna yang mengelola isi website DPRD Kota Salatiga, sedangkan administrator adalah pengguna yang bertanggung jawab terhadap pengaturan website DPRD Kota Salatiga.

Website atau situs DPRD Kota Salatiga memiliki unsur-unsur penunjangnya, baik nama domain, hosting serta desain web. Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name atau alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet, menggunakan <http://www.dprd-salatigakota.go.id>.

DPRD Kota Salatiga merupakan instansi/lembaga penyelenggara negara (legislatif) yang di bentuk oleh pemerintah, sehingga DPRD Salatiga menggunakan dan memiliki satu Nama Domain go.id, yang mengacu kepada singkatan resmi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara yaitu <http://www.dprd-salatigakota.go.id>.

Untuk Web Hosting yang dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar, video, data email, statistik, database dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website, DPRD Salatiga juga sudah memiliki. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website.

Web Hosting DPRD Salatiga memiliki kontrol panel yang terproteksi dengan username dan password untuk administrasi website. Besarnya hosting juga sudah cukup memadai dengan menyewa web hosting per tahun.

Unsur website/situs yang tidak kalah penting dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website.

Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program/software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer.

Dalam pengembangannya, web designer humas Sekretariat DPRD Salatiga mengerjakan desain website dikomputer secara offline. Berbagai bahasa program, data informasi teks, gambar, video, dan suara telah menjadi file-file pendukung adanya website. File tersebut bisa dibuka menggunakan program penjelajah (browser) sehingga terlihatlah sebuah website utuh di dalam komputer secara offline sebelum masuk ke situs/web <http://www.dprd-salatigakota.go.id>.

Guna mendukung kelanjutan dari situs/website <http://www.dprd-salatigakota.go.id>. Humas Sekretariat DPRD memerlukan pemeliharaan setiap waktu sesuai kebutuhan anggota Dewan, seperti penambahan informasi, berita, artikel, link, gambar atau lain sebagainya, karena tanpa pemeliharaan yang baik situs akan terkesan membosankan atau monoton juga akan segera ditinggal pengunjung.

Pemeliharaan situs website <http://www.dprd-salatigakota.go.id> dilakukan per periode, setiap hari untuk `peng_update_an` dan per tahun untuk keseluruhan. Pemeliharaan rutin digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan berita dan artikel, sedang pemeliharaan periodik digunakan dalam hal susunan anggota dan lain sebagainya(ss)

***J)Penulis adalah Tim Pranata Komputer Sekretariat DPRD Kota Salatiga**

Membangun Bangsa dengan Membaca

Oleh : Fahmi Azhari¹⁾



Membaca tidak mengenal usia dan waktu, kapanpun dan dimanapun. Tidak ada istilah berhenti untuk menggali ilmu. Semua orang pasti mengetahui bahwa membaca adalah kegiatan sarat akan manfaat. Buku menjadi solusi memecahkan kebodohan dan membaca adalah kuncinya, maka tak salah jika muncul slogan seperti “Buku adalah Jendela Dunia”. Buku bisa diibaratkan seperti mesin perubahan, jendela dunia, dan mercusuar yang dipancarkan di samudera waktu.

Sampai ajal menjemput pun, tak boleh ada kata menyerah untuk belajar. Salah satunya adalah membaca, dengan membaca pengetahuan pasti bertambah. Membaca memiliki dampak positif bagi perkembangan kecerdasan, antara lain : Pertama, mempertinggi kecerdasan verbal karena dengan banyak membaca akan memperkaya kosa kata. Kedua, meningkatkan kecerdasan matematis-logis dengan “memaksa” kita menalar, mengurutkan dengan teratur dan berpikir logis untuk dapat mengikuti jalan cerita atau memecahkan suatu misteri. Ketiga, mengembangkan kecerdasan intrapersonal dengan mendesak kita merenungkan kehidupan dan mempertimbangkan kembali

keputusan akan cita-cita hidup. Dan Keempat, membaca dapat memicu imajinasi dengan mengajak kita membayangkan dunia beserta isinya, lengkap dengan segala kejadian, lokasi dan karakternya.

Buku merupakan sumber informasi segala kebutuhan yang kita perlukan, mulai dari iptek, seni budaya, ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan keamanan dan lain-lain. Gemar membaca buku membuka wawasan dunia intelektual sehingga dapat mengubah masa depan serta mencerdaskan akal, pikiran, dan iman. Tanpa membaca buku, tanpa ada buku, dunia akan bodoh, dan buta huruf semakin banyak.

Berbeda dengan televisi yang masih amat ketinggalan dibandingkan dengan buku. Televisi merupakan “media pasif” yang tidak mengajak kita berpartisipasi dalam belajar atau berpikir kreatif. Peraih Nobel Sastra tahun 1987 yang bernama Joseph Brodsky, pernah menyatakan bahwa salah satu dari kejahatan yang lebih buruk daripada membakar buku adalah tidak membaca buku. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bangsa yang buruk dan siap menghadapi kehancuran peradaban adalah bangsa yang tidak gemar membaca.

Data statistik mencatat 84% penduduk Indonesia sudah melek huruf, tetapi menumbuhkan budaya membaca masih merupakan hal yang relatif cukup sulit dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia perlu menengok kembali sejarah Bangsa Jepang pada masa lalu. Ketika Jepang diporak-porandakan dengan adanya bom di Kota Hiroshima dan Kota Nagasaki, kaisar Jepang pada saat itu tidak menanyakan berapa korban yang meninggal, namun justru bertanya “berapa jumlah guru yang masih hidup?” Kita dapat mengambil makna historis dari Negara Jepang ini sebagai alat picu untuk bangkit membangun dunia pendidikan, termasuk didalamnya membudayakan gemar membaca.

Menumbuhkan minat membaca harus menjadi salah satu prioritas dalam dunia pendidikan. Adapun unsur-unsur yang dapat memperlancar perkembangan minat baca masyarakat antara lain: Pertama, keluarga. Keluarga adalah elemen terkecil dalam masyarakat. Di lingkungan keluarga pendidikan pertama kali dilakukan. Oleh karena itu, peran keluarga dalam menumbuhkembangkan minat baca masyarakat



Perpustakaan Daerah Kota Salatiga memberi layanan masyarakat untuk membaca. Buka mulai hari Senin hingga Minggu. Setiap hari Senin-Jumat, buka mulai pukul 08.00 – 20.00, hari Sabtu-Minggu, jam 08.00 hingga 16.00.

tidak dapat dilupakan. Memberikan contoh langsung adalah cara terbaik dalam menumbuhkan minat membaca dalam keluarga. Inilah yang dalam sistem among yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara disebut dengan “ing ngarsa sung tuladha”. Orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga wajib memberikan contoh (tuladha) secara langsung sehingga anak terbiasa membaca dan mendiskusikan bacaannya dengan orang tua. Orang tua juga harus melatih rasa ingin tahu anak, bukan mendiktenya sehingga anak akan memiliki daya kreativitas yang lebih tinggi. Karena pada dasarnya membaca dapat mengembangkan kreativitas manusia. Selain itu, menumbuhkan minat baca dalam keluarga yang menjadi cikal bakal berkembangnya minat baca masyarakat dapat pula dilakukan dengan membudayakan memberi buku sebagai hadiah. Kedua, Perpustakaan. Perpustakaan memegang peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan minat baca masyarakat. Di perpustakaan masyarakat dapat memperoleh informasi bacaan dan berbagai referensi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Peran perpustakaan tidak dapat digantikan oleh internet secara penuh. Peran perpustakaan tetap tidak dapat dipisahkan dari dunia membaca. Ketiga, peran pemerintah dalam mengembangkan minat baca masyarakat adalah dengan mendukung dan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan tersebut, misalnya: lomba-lomba kepenulisan, pameran dan bedah buku, temu penulis, pelatihan kepenulisan, dan lain-lain.

Kegiatan-kegiatan semacam itu harus dikemas semenarik mungkin sehingga masyarakat merasa tertarik dan merasa familiar dengan acara tersebut.

Selain itu, pemerintah perlu lebih memperhatikan perkembangan organisasi kepenulisan di masyarakat, sekolah maupun berbagai universitas di daerahnya karena organisasi-organisasi itulah yang secara tidak langsung ikut mengembangkan minat baca masyarakat. Menumbuhkan budaya gemar membaca adalah dengan memperkenalkan arti penting membaca bagi kehidupan. Selanjutnya perlu membentuk kebiasaan membaca mulai dari keluarga, dipuaskan dengan fasilitas perpustakaan dan dukungan pemerintah. Perlu ditekankan bahwa dengan membentuk kebiasaan, lama-lama kebiasaan yang membentuk kita. Menjadikan membaca sebagai kegiatan pokok yang setara dengan makan dan minum (harus dilakukan setiap hari) adalah puncak tujuan budaya gemar membaca.

Jadi jelas, bahwa segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini pasti ada manfaatnya bagi umat manusia. Akan tetapi kita kebanyakan tidak tahu mengaplikasikannya ke jalan positif, yang pasti jika ada kemauan pasti ada jalan. Man Jadda Wajada (jika bersungguh-sungguh pasti berhasil). Mari kita tingkatkan minat baca dalam keluarga kita ! Semoga.(ss)

***’Penulis adalah
Warga Gendongan Tingkir Salatiga***

SEKILAS

Penyelenggaraan PEMILU 2019

Foto: Boedys

Saat ini penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 sudah berlangsung yang detail kegiatan dan waktunya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Pemilu 2019 merupakan Penyelenggaraan Pemilu secara serentak untuk memilih DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden. Penyelenggaraan Pemilu secara serentak ini merupakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 14/PUU-XI/2013 Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbeda dari penyelenggaraan Pemilu sebelumnya.

Dalam kerangka menjalankan amanah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka disusunlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang akan menjadi pedoman secara global penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Secara prinsip Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam 3 (Tiga) Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu juga untuk menjawab dinamika politik tentang pengaturan penyelenggaraan dan

peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.

Tahapan dan Jadwal Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa seluruh partai politik calon peserta pemilihan umum (Pemilu) 2019 harus mengikuti verifikasi faktual.

Hal itu sesuai dengan putusan MK yang mengabulkan permohonan uji materi pasal 173 ayat (1) sepanjang frasa 'telah ditetapkan' dan (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Adapun KPU Kota Salatiga telah melaksanakan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Peserta Pemilu mulai tanggal Oktober 2017 sampai dengan 17 Pebruari 2018.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017, parpol dianggap memenuhi syarat Pemilu apabila ditemukan paling sedikit 18 orang atau 10 persen anggota yang dibuktikan lewat kartu anggota dan e-KTP.

Dalam pengumuman yang dilakukan KPU di Hotel Laras Asri pada Kamis (8/1/2018) diketahui ada dua partai lama dan satu partai baru yang tidak melengkapi berkas-berkas syarat verifikasi dan ada 13 partai lain telah dinyatakan lolos verifikasi.

Gerindra, PAN, PKS, PDIP, Demokrat, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, PBB merupakan partai lawas, ditemani tiga partai anyar yaitu Berkarya, Garuda, dan Perindo. Adapun dua partai lama tersebut adalah PKPI dan Hanura. Sementara partai baru yang tak lolos adalah PSI.

Selengkapnya tahapan dan jawal pemilu 2019 adalah Penataan Daerah Pemilihan (DAPIL) tanggal 5 Januari – 5 April 2018. Sedang penyusunan daftar



pemilih adalah Penetapan DPS tingkat Kab/Kota, 15 – 17 Juni 2018, Pengumuman DPS 18 Juni – 1 Juli 2018, Masukan dan Tanggapan Masyarakat 18 Juni – 8 Juli 2018, Perbaikan DPS 15 – 21 Agustus 2018, Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kab/Kota 8-21 Juli 2018 serta Pengumuman DPT tanggal 28 Agustus 2018 -17 April 2019.

Untuk kampanye rapat terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga dilaksanakan tanggal 23 Sept 2018 -13 April 2019, sedang kampanye rapat umum dan iklan media elektronik tanggal 24 Maret-13 April 2019. Adapun masa tenang tanggal 14-16 April 2019.

Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 Juni 2019. Kegiatan ini terbagi atas penyampaian BA hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan kepada PPK tanggal 18 April 2019 dan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat PPK tanggal 19 April – 2 Mei 2019.

Peresmian Keanggotaan DPRD Prop dan Kab/Kota dilaksanakan bulan Juli – Agustus 2019, sedang untuk DPR dan DPD Agustus – September 2019. Untuk Pengucapan Sumpah Janji DPRD Prop dan Kab/Kota bulan Agustus – Oktober 2019 sedang DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2019.

Hal Baru Pemilu 2019

Ada beberapa perubahan yang diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2018, menyangkut penyelenggaraan pemilu 2019 diantaranya :

Penentuan jumlah anggota KPU Propinsi, KPU Kabupaten atau Kota didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif (kelurahan atau Desa, kecamatan), berkisar 7-5 orang untuk KPU Provinsi, dan 5-3 untuk KPU Kab/Kota.

Jumlah anggota PPK dikurangi dari 5 orang menjadi 3 orang. Kelembagaan Pengawas, yaitu Panwaslu kab/kota dipermanenkan menjadi Badan pengawas Pemilu. Jumlah kursi DPR bertambah menjadi 575 orang.

Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen) naik menjadi 4%, metode konversi suara menjadi *sainte league* (metoda hitung dengan bilangan pembagi) murni. Penanganan pelanggaran administrasi dan persidangnya tidak lagi memberikan rekomendasi kepada KPU. Bawaslu Kabupaten dan Kota berwenang menyelesaikan sengketa, dan menjatuhkan sanksi administrasi berupa diskualifikasi sebagai peserta pemilu. (**Syaemuri/ss**).



Penataan Lingkungan dapat Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan

Foto: Andy

Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga Eny Endang Sutriani, ST, MT

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Salatiga adalah dinas baru yang dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) no 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dinas PKP yang beralamat di Jl. Ahmad Yani no 14 Kota Salatiga Kode Pos 50724 Telp (0298-326945) ini mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Plt. Dinas PKP Kota Salatiga, Eny Endang Sutriani, ST, MT di temui di ruangan kerjanya beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa terdapat 3 bidang yang diampu di Dinas PKP yakni Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman, Bidang Pertanahan dan Sekretariat.

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman sub urusan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana, sarana, dan utilitas umum, sertifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanahan sub urusan izin lokasi, sengketa tanah garapan, ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah kosong dan izin membuka tanah serta penggunaan tanah.

Lebih lanjut Mbak Eny mengatakan bahwa untuk tahun 2018 ini dinas yang dia pimpin merencanakan penataan lingkungan di kawasan di Kota Salatiga, ada 6 titik yang menjadi fokus tahun 2018 ini, diantaranya di Kelurahan Kutowinganun Lor, Salatiga, Dukuh, Kalicacing, Tingkir Lor dan Kauman Kidul.

“Bentuk kegiatannya berupa pembangunan pengolahan sampah rumah tangga, safety tank, MCK (Mandi Cuci Kakus), sumur resapan, drainase, pembuatan taman dan jalan lingkungan.” Ungkap Mbak Eny, panggilan akrab Eny Endang Sutriani, ST, MT

Lebih lanjut Mbak Eny mengatakan akan menata kawasan di sekitaran Sungai Benoyo, kita



Foto: Andy

Halaman Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.14 Salatiga

akan tata sedemikian rupa jalan lingkungannya, drainase dan juga taman, karena selama ini kawasan tersebut menjadi sorotan dalam penilaian Adipura.

Salah satu menyukseskan visi misi dari Walikota Salatiga adalah penataan wajah kota dan pengentaskan kemiskinan, Dinas DKP akan menata kawasan Kalitaman. Disamping untuk memelihara sumber air dan untuk mempercantik kawasan, akan dibangun taman sehingga bisa sebagai sarana wisata bagi masyarakat.

“Dengan adanya penataan ini diharapkan ekonomi kerakyatan sekitar Kalitaman akan tumbuh sehingga goalnya adalah wajah kota tertata dan pengentasan kemiskinan pun tercapai.” Kata Eny.

Anggaran di APBD Kota Salatiga juga terhitung sangat besar untuk program penataan kota terutama dalam mengatasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan program Bedah Rumah, ini sejalan dengan program KOTAKU.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh nasional yang merupakan Rencana Strategis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019 dengan sasaran tercapainya pengentasan pemukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh.

Terkait maraknya pembangunan perumahan cluster di Salatiga yang tidak menyediakan lahan pemakaman Mbak Eny mengatakan bahwa setiap ada pengajuan ijin pembangunan perumahan baru

pihaknya mewajibkan pihak pengembang untuk membayar retribusi untuk penggunaan ke Tempat Pemakaman Umum milik Pemkot Salatiga yang terletak di Blondo Celong dan Ngeemplak.

Permasalahan yang muncul di kemudian hari lainnya adalah tentang penyerahan Fasum (Fasilitas Umum) kepada Pemerintah Kota karena banyak warga yang mengeluh usulan mereka pada Musrenbang ditolak dikarenakan perumahan mereka dianggap masih menjadi tanggung jawab dari pengembang.

“Banyak pengembang yang menyerahkan fasum tersebut ke Pemkot namun sudah tidak sesuai dengan gambar tapak awal, misalnya awal untuknya ruang terbuka hijau namun saat ini telah beralih fungsi menjadi Posyandu dan lain sebagainya.” Papar Ibu murah senyum ini.

Terkait rencana DPRD Kota Salatiga mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Salatiga Inisiatif DPRD tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Salatiga Tahun 2017-2036, Dinas PKP menyambut baik hal ini karena Perda ini akan menjadi acuan bagi Dinas PKP dalam menjalankan tugas pokok fungsinya.

“Dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) ini diharapkan menjadi dasar bagi kami untuk menata para pengembang lebih tertib sehingga kedepannya tidak menciptakan kawasan kumuh di Kota Salatiga.” tutur wanita berhijab ini. **(Andy Wijayanto/ss)**



Harus Disiapkan Pengelolaan dan Penataan Wilayah

Tugu Batas Kota Salatiga

Pada tahun 2018 ini DPRD Kota Salatiga menginisiasi Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Inisiatif DPRD Kota Salatiga Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP).

Ketua Pansus (Panitia Khusus) Raperda RP3KP DPRD Kota Salatiga, Supriyadi Fatkhi mengatakan bahwa tujuan DPRD mengusulkan Raperda ini untuk menyiapkan Kota Salatiga menuju kota yang smart, kota yang pengelolaan dan penataan wilayahnya harus disiapkan untuk 20-25 tahun kedepan. Ini selaras dengan Perda RTRW dan Perda RDTR yang telah disahkan. Untuk itu DPRD menginisiasi Raperda RP3KP sebagai panduan bagi Pemkot Salatiga dalam merencanakan zona perumahan dan pemukiman supaya Salatiga nyaman untuk ditinggali dan tidak semrawut.

Lebih lanjut Supriyadi mengatakan bahwa secara luas wilayah Salatiga mempunyai luas wilayah 57Km² yang lebih luas dari Solo yang hanya 47km² namun jumlah penduduknya jauh lebih banyak Solo hampir 1 Juta jiwa sedang Salatiga hanya 200 ribu jiwa. Tidak menutup kemungkinan 20 tahun mendatang penduduk Salatiga akan sama dengan Solo maka dari itu perluantisipasi sejak dini.

“Makanya agar tidak terjadi kemacetan, kesemrawutan, tata ruangnya bagus kita mulai tata dari sekarang, dimana saja sekiranya perlu dikembangkan zona kawasan pemukiman mana yang dikembangkan menjadi kawasan perumahan sehingga para pengusaha properti bisa mempunyai

panduan dari Pemkot.” Kata Politisi Gerindra ini.

Karena bukan tidak mungkin Salatiga akan menjadi kota penyangga bagi Kota Semarang dan Kota Solo apalagi dengan adanya akses tol yang menghubungkan kedua kota tersebut dengan Salatiga. Orang bisa saja bekerja di Semarang atau di Solo namun mereka akan tinggal di Salatiga untuk itu maka dari sekarang kita harus siapkan daya dukung baik untuk penataan wilayah, sanitasi dan ketersediaan air bersih.

Secara umum wilayah Kota Salatiga masih memungkinkan untuk didiami sekitar 800 ribu jiwa tinggal sekarang dalam pengembangan wilayah mana yang akan dibangun perumahan secara vertikal berupa apartemen atau Rusunami (Rumah Susun Milik Sendiri) dan untuk wilayah yang RTH (Ruang Terbuka Hijau) nya masih baik dikembangkan perumahan secara horisontal bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Masih menurut Fatkhi adanya alih fungsi lahan dulu terjadi karena Perda RDTR (Rancangan Detail Tata Ruang) belum selesai, dan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) masih bersifat makro. Di RDTR itulah ada penjabaran dari sebuah tata ruang wilayah sehingga mana yang masuk zona pemukiman mana lahan pertanian basah atau kering menjadi jelas sehingga penyalahgunaan alih fungsi bisa diminimalisir.

“Pada prinsipnya peraturan adalah untuk memperjelas, sehingga munculnya dugaan penyimpangan itu karena aturannya memang belum jelas. Yang penting Pemerintah harus tegas mana



Rapat Komisi C DPRD Kota Salatiga di Ruang Nusantara Gedung DPRD Kota Salatiga.

wilayah perumahan mana wilayah untuk pengembangan pemukiman, ijinnya juga harus jelas dan terukur berapa biaya, waktu penyelesaiannya dan prosedurnya seperti apa” Kata Anggota Komisi C.

H. Suniprat anggota Pansus Raperda RP3KP secara terpisah mengatakan Raperda RP3KP ini disusun tidak lepas dari permasalahan pembangunan kawasan pemukiman yang terjadi di Kota Salatiga. Karena selama ini masih banyak zona-zona wilayah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, ini menjadi masalah bagi masyarakat maupun pelaku usaha properti, sehingga terjadi permasalahan terutama pada alih fungsi lahan.

Selama ini banyak pengembang perumahan yang merugikan bagi masyarakat disekitar perumahan apalagi terkait dengan lahan pemakaman. Sering terjadi gesekan di masyarakat lokal dengan penduduk perumahan menyangkut lahan makam seperti yang terjadi di Gendongan, Ngentak dan Sawahan.

“Selama ini para pengembang memberikan kompensasi ke Pemerintah Kota berupa pembayaran retribusi namun karena keterbatasan lahan makam maka pengembang bisa menyerahkan secara langsung berupa tanah makam bukan berupa uang yang akan menjadi PAD.” Kata Anggota Komisi C ini

Lebih lanjut Pak Niprat mengatakan bahwa seiring berkembangnya perumahan yang semakin padat namun tidak diimbangi dengan penyediaan

lahan pemakaman akan menjadi masalah dikemudian hari. Karena Pemerintah Kota Salatiga sendiri hanya memiliki Tempat Pemakaman Umum (TPU) di dua lokasi yakni di Blondo Celong dan Ngempak dengan lahan yang terbatas pula.

Sebagaimana diketahui rencana pembangunan TPU seluas 6 Hektar di Kelurahan Kumpulrejo masih terkendala masalah teknis. Padahal dari kalangan DPRD Kota Salatiga telah memberikan dukungan bagi Pemerintah Kota untuk melakukan pengembangan TPU tersebut.

Selain itu H. Suniprat juga menyoroti terkait penataan tata ruang perumahan itu sendiri baik sistem drainase, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari perumahan itu sendiri, jangan sampai para pengembang tersebut dalam mengembangkan perumahan tidak bersinergi dan berkoordinasi dengan Pemkot dalam penataan lingkungan.

“Pengembang perumahan harus menyediakan sumur resapan yang bisa menampung air hujan jangan hanya sumur biopori, karena kurangnya lahan terbuka hijau untuk tangkapan air di perumahan.” Kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan

Pemerintah harus komitmen dan tegas untuk masalah ini karena dikhawatirkan akan timbul permasalahan di kemudian hari baik itu banjir dimusim hujan maupun kekurangan air pada saat musim kemarau yang keduanya akan merugikan masyarakat. **(Andy Wijayanto/ss)**

ALOKASI DANA APBD Dukung Penanggulangan Bencana Alam



Ketua DPRD saat membantu masyarakat membersihkan ranting pohon akibat bencana angin.

Indonesia adalah satu negara yang rawan akan terjadi bencana, karena mempunyai posisi geografis yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia: Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik. Indonesia merupakan bagian dari Ring Of Fire (Cincin Api) yakni negara yang memiliki cukup banyak gunung berapi aktif.

Bahkan menurut UN ISDR (United Nation International Strategy For Disaster Reduction) lembaga di bawah PBB yang menbidangi masalah pengurangan resiko bencana menempatkan Indonesia di peringkat tertinggi untuk acaman gunung berapi, bahaya tsunami, tanah longsor, banjir dan gempa bumi.

Tingginya posisi Indonesia ini dihitung dari jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan nyawa bila bencana alam terjadi. Baik itu terpapar secara langsung maupun terdampak dari bencana alam yang terjadi.

Untuk itu Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).

Di Jawa Tengah sendiri telah terbentuk BPBD di 31 Kabupaten/Kota yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) maupun

Peraturan Walikota/Bupati (Perwali/Perbub). Ada dua kota di Jawa Tengah yang belum mempunyai BPBD yakni Kota Salatiga dan Kota Magelang.

Untuk itu DPRD Kota Salatiga menginisiasi pembentukan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam. Salah satu tujuannya mendorong Pemerintah Kota Salatiga untuk membentuk BPBD Kota Salatiga.

Drs Sarmin, Ketua Panitia Khusus (Pansus) III Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam mengatakan walaupun Kota Salatiga mempunyai tingkat prevalensi (kelaziman) bencana alam yang relatif rendah namun tidak bisa terlepas dari potensi terjadinya bencana alam

“Kota Salatiga beberapa kali telah terjadi bencana alam dan bencana non alam berupa angin puting beliung, kebakaran, Pohon tumbang dan banjir bahkan ada orang hanyut” Kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut, Drs. Sarmin mengatakan penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut masih belum dapat terlaksana dengan baik karena terkendala dengan beberapa hal diantaranya belum adanya Perda sebagai acuan bagi para stakeholder. Selain itu tidak ada kelembagaan berupa BPBD yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk penanggulangan bencana.

“Dan yang tidak kalah penting adalah alokasi pendanaan dari APBD (Anggaran Penerimaan dan



Rapat Komisi B DPRD Kota Salatiga di ruang Nusantara.

Belanja Daerah) dari Pemkot guna mendukung penanggulangan bencana yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.” Ucap Legislator dari Sidorejo ini.

Anggota Pansus III lainnya, Mahmudah, SH mengatakan Raperda ini dibuat untuk peyelenggaraan penanganan bencana secara menyeluruh meliputi penetapan kebijakan, pencegahan bencana, masa tanggap darurat dan rehabilitasi bagi korban yang terpapar bencana tersebut.

“Selama ini penanganan bencana lebih banyak terfokus pada saat terjadinya bencana, namun terkadang kita melupakan upaya untuk pencegahan dan pemulihan serta rehabilitasi korban maupun fasilitas yang rusak karena bencana tersebut.” Kata Wakil Ketua Fraksi Karya Pembangunan ini.

Masih menurut Mahmudah, Raperda ini dimaksudkan untuk penanggulangan bencana yang memberikan perlindungan kepada masyarakat akan ancaman bencana, penanggulangan yang lebih terencana, terpadu, terkordinasi dan menyeluruh.

“Jadi penyelenggaraan penanggulangan bencana bisa diampu oleh satu lembaga sebagai kordinator yang bisa dibantu oleh elemen masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya,

sehingga akan jelas baik-baik itu tugas fungsi maupun pendanaannya.” ucap satu-satunya wakil PPP di DPRD Salatiga ini.

Sebagaimana diketahui untuk penanganan bencana di Kota Salatiga selama ini diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui Seksi Penanganan Bencana dengan dibantu dari anggota Linmas (Perlindungan Masyarakat) Kota Salatiga.

Sedangkan untuk penanganan korban bencana berada di Dinas Sosial Kota Salatiga melalui Seksi Perlindungan Sosial Penanganan Korban Bencana dengan di bantu relawan Tagana (Taruna Siaga Bencana) yang jumlahnya di Salatiga cukup terbatas.

Raperda Peyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam juga dimaksudkan agar para stakeholder membuat sebuah roadmap baik dalam penanganan bencana dan upaya untuk pencegahan pontensi bencana baik itu bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

Dengan memberikan edukasi bagi masyarakat tentang tata cara pencegahan, upaya penanganan awal jika terjadi bencana dan evakuasi untuk meminimalisir juga kerugian baik harta, benda bahkan nyawa. **(Andy Wijayanto/ss)**



Satuan Polisi Pamong Praja Pentingnya Patroli dan Pemetakan Daerah Rawan Bencana

Foto: andy

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga, Yayat Nurhayat, AP, M.Si

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Kota Salatiga yang masih belum mempunyai BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) untuk urusan penanganan bencana masih melekat dalam tugas pokok fungsi (Tupoksi) dari Satpol PP.

Kepala Satpol PP Kota Salatiga Yayat Nurhayat, AP, M.Si ditemui dikantornya beberapa waktu yang lalu mengatakan untuk penanganan bencana di Salatiga merupakan tupoksi dari Bidang Pemadam kebakaran, dimana bidang tersebut terdiri dari 2 (dua) seksi yakni Seksi Pemadam Kebakaran dan Seksi Penanganan Bencana.

Lebih lanjut Pak Yayat mengatakan dalam penanganan bencana di Salatiga ada dua faktor yang menjadi konsen di Satpol PP yakni faktor internal dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan mengadakan pelatihan penanggulangan dan penanganan bencana baik tingkat kota maupun latihan bersama yang dikordinir oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Untuk faktor eksternal, pihaknya dengan menjalin jaringan dengan pihak lain dengan

melibatkan masyarakat Salatiga maupun dengan masyarakat atau instansi daerah lain di sekitar Kota Salatiga seperti dengan BPBD Kab. Semarang maupun Kab. Boyolali.

“Khusus untuk kebakaran, seperti sudah ada kesepakatan atau aturan main jika terjadi kebakaran, daerah terdekat diminta atau tidak diminta akan membantu. Bahkan jika terjadi insiden yang besar di daerah tetangga kita, maka kita akan pantau jika memang memerlukan kita langsung berangkat membantu.” Lanjut Yayat.

Selain itu Satpol PP juga intens untuk melakukan pencegahan bencana dengan melakukan patroli di daerah rawan bencana maupun dengan memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana, dengan melibatkan pihak kelurahan dan Satlinmas (Satuan Perlindungan Masyarakat).

“Kita melibatkan Satlinmas yang kita miliki untuk membantu untuk penanganan dan pencegahan bencana. Karena kita melihat Satlinmas lah yang lebih paham tentang kondisi dilapangan sehingga lebih tepat kita dalam menangani jika terjadi bencana.” Kata mantan Camat Sidomukti ini.

Masih menurut Pak Yayat, Satlinmas sendiri memang masih masuk menjadi tupoksi dari Satpol PP di Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat sehingga lebih mudah



Foto: andy

Ketua DPRD datangi lokasi kebakaran..

dalam melakukan koordinasi dalam melakukan pencegahan dan penanganan bencana.

Terkait pencegahan bencana kebakaran, Satpol PP sedang melakukan kegiatan pengecekan sumur hydrant yang di wilayah Kota Salatiga dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di beberapa instansi, pertokoan dan fasilitas publik lainnya. Sehingga jika terjadi kebakaran peralatan itu dapat berfungsi dengan baik.

Selain itu Satpol PP Kota Salatiga juga aktif memberikan sosialisasi dan pelatihan penanganan dini bencana di instansi baik swasta, Pemerintah maupun sekolah-sekolah yang ada di Kota Salatiga. Yang diharapkan dengan kegiatan ini akan tumbuh peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan bencana.

“Saat ini kita telah menjalin kerjasama dengan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) Kota Salatiga memberikan pelatihan terkait penanganan masalah kebakaran khususnya. Bahkan Alhamdulillah saat ini banyak sekolah-sekolah yang meminta kita untuk memberikan pelatihan, ada yang kita yang memberikan di sekolah, ada yang sekolah datang ke kita bahkan kita sampai

kewalahan.” Ungkap pria kelahiran Sukabumi ini.

Guna mengatasi masalah bencana kekeringan yang saat ini mulai terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang juga berimbas di Kota Salatiga, Satpol PP telah mengantisipasi sejak dini. Sejak beberapa waktu yang lalu Satpol PP telah memetakan wilayah yang selama ini sering terjadi kekurangan air.

Wilayah Noborejo, Kumpulrejo, Randuacir dan Mangunsari yang tahun kemarin terjadi kekurangan air telah dipantau jika memang memerlukan dropping air sehingga Satpol PP bisa segera berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Salatiga untuk menghubungi PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) untuk menyediakan air bersih bagi warga di wilayah kelurahan tersebut.

“Saat ini berdasarkan pantau kami dilapangan untuk kebutuhan air bagi warga masyarakat masih mencukupi, namun untuk hewan ternak mereka sudah mulai kekurangan. Namun kita prioritaskan dulu untuk kebutuhan manusianya dulu baru untuk hewan ternak.” imbuh warga Mangunsari ini. **(Andy Wijayanto/ss)**.

Bantuan Hukum Warga tidak Mampu Butuh Landasan Hukum yang Kuat



Ketika Indonesia sebagai *nation state* (Negara kebangsaan) dideklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ditegaskan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia bukan hanya tugas negara.

Salah satu *facet* penopang tujuan kemerdekaan adalah ditegaskannya bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Prinsip supremasi hukum dan *equality before the law* menjadi pendulum pengembangan tata hukum Indonesia. Artinya, proses pembangunan hukum harus dipusatkan pada prinsip bahwa hukum menjadi aturan main yang disepakati bersama dalam menata dan mengelola kehidupan bernegara. Hal ini memiliki makna penyelenggaraan kekuasaan Negara harus didasarkan pada hukum. Selain itu, Negara harus memperlakukan setiap warga Negara sama di depan hukum, tanpa adanya sikap diskriminatif.

Equality before the law memiliki makna bahwa setiap orang memiliki kesempatan atau hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Dari perspektif ini, akses untuk mendapatkan keadilan merupakan hak dasar dari setiap warga Negara. Dengan kata lain, akses terhadap keadilan merupakan hak asasi manusia.

Tuntutan untuk menerapkan prinsip *equality* yang diperhadapkan pada fakta empirik adanya *unequality* (dari aspek pengetahuan, kemampuan ekonomi, posisi struktural, dll.) sejatinya mengandung pesan imperatif bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu menjadi keniscayaan. Dan, peran tersebut harus dipikul oleh Negara.

Bantuan hukum terhadap (kelompok) masyarakat tidak mampu, sejatinya telah menjadi kajian dan komitmen berbagai pihak baik pada tingkat global, regional, maupun pada tingkat nasional. Pada tataran global, misalnya, United Nations Development Program (UNDP) merilis laporan pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan tidak mungkin dapat tercapai bila empat miliar penduduk dunia yang terpinggirkan tidak terlindungi secara hukum.

Pada tingkat Nasional, selain pemerintah membuat program Strategi Nasional Akses pada Keadilan (SNAK), pemerintah juga telah memberlakukan UU No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perhatian terhadap persoalan ini juga menjadi komitmen dari berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia.

Bantuan Hukum di Salatiga

Kota Salatiga sejatinya telah melakukan berbagai program yang pada intinya memberikan bantuan hukum terhadap warga Kota Salatiga yang tidak mampu. Namun demikian, program ini belum memiliki landasan hukum yang kuat. Dalam rangka untuk memberikan landasan hukum yang memadai terhadap penyediaan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat yang tidak mampu, Kota Salatiga perlu memiliki Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Berpijak pada uraian tersebut, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda Kota Salatiga tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu difokuskan pada permasalahan tentang bagaimana landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk dijadikan acuan dalam mengidentifikasi materi muatan Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu serta Pokok-pokok materi muatan apa saja yang direkomendasikan untuk dimuat di dalam

Rancangan Perda tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu berdasarkan kajian akademik dari aspek filosofis, sosiologis dan yuridis.

Rule of Law and Access to Justice

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) secara tegas telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat(3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi sesuai dengan konstitusi, Indonesia telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Istilah negara hukum pertama kali dikemukakan dalam sebuah istilah Inggris yang dikemukakan oleh A.V. Dicey, yaitu *Rule of Law*. Istilah *Rule of Law* mulai populer dengan terbitnya karya Dicey pada tahun 1885, dengan judul *Introduction to the Study of Law and Constitution*.

Pengertian negara hukum adalah suatu sistem ketatanegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan yang sama dan setiap orang yang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang pembedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat.

Program Bantuan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Hukum Setda Kota Salatiga dikemukakan bahwa bagian hukum Setda Pemerintah Kota Salatiga menjadi organisasi pemerintahan daerah yang mengemban fungsi fasilitasi bantuan hukum. Sebagai landasan hukum penyelenggaraan fasilitasi bantuan hukum tersebut adalah Peraturan Walikota (Perwali) Salatiga Nomor 109 Tahun 2005 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan Perjanjian kerja sama Bantuan Hukum kepada Kabag Hukum Setda Kota Salatiga.

Pelayanan Bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemda Kota Salatiga dilakukan melalui Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam menghadapi permasalahan hukum. Fasilitas bantuan hukum ini meliputi tugas untuk menyalurkan Bantuan Hukum, memverifikasi lembaga Bantuan Hukum dan Menerima Laporan Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.

Menurut Kepala Bagian Hukum Kota Salatiga, bantuan hukum diartikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum ini sejalan dengan otonomi daerah,

Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya dengan menyediakan fasilitas bantuan hukum bagi orang miskin. Sebagai *leading sector* penyelenggara bantuan hukum, Bagian Hukum Pemkot Kota Salatiga membuat dan menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum yang harus dikoordinasikan dengan Bappeda.

Penyelenggaraan bantuan hukum berujuan untuk memberi perlindungan hukum dan *access to justice* bagi masyarakat tidak mampu. Kebijakan ini, dilakukan berdasarkan Standar Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan. Bagian Hukum Pemkot, antara lain dengan menyusun ketentuan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum.

Program Bantuan Hukum bagi orang miskin yang disediakan oleh Pemkot Salatiga diawali tahun 2005 dengan keluarnya Perwali Nomor 31 Tahun 2005 tentang Penggunaan dana bantuan hukum Tahun Anggaran 2005. Dalam Perwali Nomor 31 Tahun 2005.

Salah satu pertimbangan Pemkot Salatiga menyelenggarakan bantuan hukum bagi orang miskin adalah untuk mendukung program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh PN Salatiga.

Pemerintah Kota Salatiga, telah menganggarkan yang dipergunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum dan untuk mendanai pengacara Pemkot apabila Pemkot Salatiga berperkara.

Dalam program bantuan hukum ini, penduduk miskin yang menghadapi masalah hukum memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat dengan (subsidi) pembiayaan dari dana bantuan hukum Pemkot tersebut. Dalam pemberian dana bantuan hukum, Pemkot Salatiga hanya mengakomodasi bantuan hukum dalam proses litigasi, baik untuk perkara pidana maupun perdata. Untuk perkara Tata Usaha Negara (TUN), Pemkot Salatiga tidak memberikan bantuan dana apabila yang menjadi tergugat adalah Pemkot Salatiga. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.

Dalam penyaluran dana bantuan hukum, Pemkot Salatiga menyaratkan kelengkapan dokumen sebagai dasar pertimbangan untuk memutuskan memberi atau menolak pemberian dana bantuan hukum.

Adanya Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM) sangat menentukan diterima atau tidaknya persyaratan tersebut. Apabila tidak memiliki SKTM pemohon dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Beras Miskin (Raskin), atau dokumen lain sebagai pengganti Surat Keterangan Miskin. (**ss/ss**)

Pagelaran Budaya Di Taman Mini Media Promosi Salatiga



Pagelaran Sendratari Ramayana dengan judul "Banjaran Shinta"

Para duta besar negara asing mengaku terpukau menyaksikan Pentas Seni Budaya oleh perwakilan Kota Salatiga berupa Pergelaran Sendratari Ramayana dengan judul "Banjaran Shinta", di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Duta besar asing yang hadir antara lain Irak, Australia, Amerika Serikat, China, Arab Saudi, Perancis, Jepang, dan Suriname.

Anggota DPRD Kota Salatiga Bagas Aryanto saat mendampingi acara tersebut tertegun menyaksikan tarian berlatar cerita Rama dan Shinta tersebut. Usai pertunjukan, para penari mengalungkan rangkaian melati kepada para duta besar dan dilanjutkan dengan menari bebas bersama.

Selain Pergelaran Sendratari Ramayana, di tempat yang sama juga digelar pertunjukkan wayang kulit dalang bocah dan pameran produk lokal asal kota Salatiga.



Para duta besar negara asing mengaku terpukau

Beliau pribadi maupun atas nama anggota DPRD Kota Salatiga sangat mendukung pegelaran budaya asal Kota Salatiga yang digelar rutin tahunan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi tim budaya Kota Salatiga untuk



melakukan pentas Sendra Tari Ramayana beberapa waktu lalu di Anjungan Jawa Tengah.

Menurutnya kegiatan tersebut bisa berdampak positif bagi Kota Salatiga, karena menjadi media promosi kota.

"Pada tahun ini Salatiga dipercaya Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi wakil tampil di Taman Mini. Ini artinya Salatiga diakui kemampuannya dalam menampilkan kesenian yang ada. Ini juga menjadi kesempatan Kota Salatiga untuk membawa rombongan yang akan mengisi stand.

Terlihat ada stand oleh-oleh khas dari Salatiga yang ini tentu akan menguntungkan bagi UMKM asal Salatiga," terang Bagas.

"Tidak main-main yang datang ke pertunjukan adalah para duta besar asing yang antara lain; Iraq, Australia, Amerika Serikat, China, Arab Saudi, Perancis, Jepang, dan Suriname. Walikota Salatiga Yuliyanto beserta ibu, wakil walikota Muh Haris beserta ibu, kepala OPD, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota DPRD Kota Salatiga dan beberapa anggota DPRD kabupaten kota di Jawa Tengah, perwakilan OPD Provinsi Jawa Tengah, serta para pegunjung tertegun menyaksikan tarian berlatar cerita Rama dan Shinta tersebut," bebarnya.

"Pada kesempatan itu Kota Salatiga mementaskan Pagelaran Sendratari Ramayana dengan judul "Banjaran Shinta", pada 21 April 2018 pukul 19.00 WIB di Anjungan Jawa Tengah Taman Mini "Indonesia Indah".

Selanjutnya pada hari setelahnya digelar pula dalang bocah asal Kota Salatiga, ini menandakan

bahwa Salatiga memiliki potensi seni budaya yang bisa diandalkan. Oleh karenanya saya berharap agar Pemerintah Kota Salatiga memberikan perhatian lebih kepada sektor seni budaya," pinta Bagas. (*lukman fahmi/ss*)



Pagelaran Sendratari Ramayana dengan judul "Banjaran Shinta"

Ketua DPRD Kunjungi PAUD Al - Lubawi” Canden

Ketua DPRD Salatiga, M. Teddy Sulistio SE mengunjungi (PAUD) Pendidikan Anak Usia Dini “Al-Lubawi”, Canden, Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, PAUD tersebut menjalankan pendidikannya menumpang di rumah milik warga. Memang kondisinya perlu perhatian Pemerintah.

Pengurus PAUD, Eny Sugiyarti (42) mengungkapkan bahwa PAUD yang dikelolanya butuh bantuan, khususnya tempat pendidikan yang representatif.

“Kami mengakui jika PAUD Al - Lubawi, proses pembelajarannya masih menggunakan rumah milik warga. Kami sangat berterima kasih jika Bapak Ketua DPRD berkenan membantu kami,” pinta Eny Sugiyarti dihadapan Ketua DPRD.

Dijelaskan Eny Sugiarti bahwa PAUD Al - Lubawi memiliki sebanyak 42 anak didik. Menurutnya pihak pengurus telah mengajukan proposal pembangunan gedung ke Pemerintah Kota Salatiga berkali-kali, namun hingga saat ini belum ada tanggapan yang pasti dari pemerintah.



Pengelola PAUD foto bersama Ketua DPRD.

Diakui Eny bahwa rumah yang ditempati tersebut tidak cukup untuk menampung anak didik sebanyak 42, karena, tempat tersebut juga digunakan sebagai kegiatan Posyandu Lansia, TPQ, Kelompok Wanita Tani maupun untuk kegiatan pengajian rutin. **(ss/ss)**

Gelegar Seni dan Nonton Bareng Piala Dunia Di Halaman Kantor DPRD Salatiga



Pemain band Salatiga unjuk kebolehan dalam Gelegar Seni di Halaman Kantor DPRD.

Dewan Perwakilan daerah (DPRD) Kota Salatiga bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Komunitas Mobil Salatiga (KOMOSA) menggelar event Gelegar Seni Budaya yang dilanjutkan dengan nonton bareng Piala Dunia di halaman Kantor DPRD Kota Salatiga, Jumat (22/6). Rangkaian acara yang dimulai sore hari tersebut

dilanjutkan dengan nonton bareng Piala Dunia, di malam harinya. Pukul 19.00 Portugal VS Maroko, Pukul 22.00 Uruguay VS Arab Saudi sedang pukul 01.00 dini hari adalah Iran VS Spanyol.

Hadir pada kesempatan tersebut Ketua DPRD M. Teddy Sulistio, SE, Kapolres Salatiga AKBP Yimmy Kurniawan SIK MH MIK, Sekretaris Daerah Drs. Fakrurroji, Sekretaris Dewan Sri Wityowati, SE serta beberapa Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Sekretariat Kota Salatiga.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Salatiga Sri Danudjo menyambut baik kegiatan tersebut serta mengapresiasi kepada panitia yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Tak lupa Kepala Disbudpar juga mengucapkan terimakasih kepada ketua DPRD Kota Salatiga yang telah berkenan memfasilitasi kegiatan tersebut.

Ketua DPRD Salatiga berharap agar kedepan tidak hanya seni musik yang ditampilkan, namun juga hal-hal yang berbentuk tata nilai kearifan lokal, sehingga bisa nguri-uri kebudayaan lokal, khususnya Kota Salatiga. **(ss/ss)**

Penghormatan Terakhir untuk Bapak Supriyono



Suasana duka di kawasan Blotongan Salatiga.

Ketua Komisi A DPRD Kota Salatiga, Bernadus Supriyono, SE meninggal dunia di RS Elizabeth Semarang Kamis 14 Juni 2018.

Bapak Supriyono meninggal dunia setelah sempat dirawat di Rumah Sakit karena sakit pasca kecelakaan beberapa waktu yang lalu, almarhum meninggalkan 1 orang istri dan 4 orang anak.

Beliau adalah anggota DPRD Kota Salatiga dari Partai PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan Sidorejo.

Jenazah diberangkatkan dari rumah duka di kawasan Blotongan Salatiga menuju ke Gereja Katholik St. Paulus Miki untuk dilakukan Misa Requien. Selanjutnya jenazah dibawa ke Sekretariat DPRD Kota Salatiga untuk pemberian penghormatan terakhir.

Berkenan hadir dalam acara penghormatan terakhir ini Ketua DPRD dan anggota DPRD Kota Salatiga, Walikota Salatiga, Kapolres Salatiga, Sekretaris Daerah Kota Salatiga serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Salatiga M.Teddy Sulistio,SE menyampaikan rasa terima kasih atas semua penghormatan dan bantuan kepada semua pihak terhadap mendiang Pak Pri.

“Bonar (putra Pak Pri) lanjutkan perjuangan bapak di tempat terbaik, doa kami mengiringi Mas Pri, kakak kami saudara kami mengiringi kepergianmu.” ucap Bung Teddy penuh haru.

Dalam kesempatan tersebut dibacakan daftar riwayat dan pengabdian Bapak B. Supriyono, SE oleh Sekretaris DPRD Kota Salatiga Sri Wityowati, SE sebelum jenazah diberangkatkan ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Ngempak Dukuh Kota Salatiga. (wj/ss)

Ketua DPRD Dukung Kegiatan Siswa Belajar di Jerman

Di era globalisasi ini, hasil pendidikan harus bisa memenuhi standar yang diharapkan banyak pihak. Hal itu dilakukan oleh SMA Kristen 1 Salatiga dengan mengirimkan empat siswanya beserta dua guru pendamping untuk berangkat menimba ilmu di Jerman, pada 1-20 Juni mendatang. Mereka akan mengikuti edutrip ke Hamburg.

Adapun Empat siswa yang akan dikirim tersebut adalah Ni Luh Ayu Ada Akila, Rafael Laksamana Jatmiko, Abhinando Indrapura dan Aaron Berliano Handoko. Mereka akan tinggal di keluarga asuh Jerman selama menjalani program tersebut.

Kepala SMA Kristen 1 Salatiga Kris Winarti menuturkan bahwa keempat siswa dan dua guru pendamping tersebut akan memperkenalkan Kota Salatiga di Hamburg. Selama disana, delegasi tersebut juga akan mengikuti proses pendidikan yang dilaksanakan di salah satu negara di Eropa tersebut.

“Nanti disana, anak-anak akan melakukan presentasi mengenai Kota Salatiga dan juga



Siswa dan Guru SMA Kristen 1 Salatiga saat beraudiensi dengan Ketua DPRD Salatiga.

mengadakan tari kreasi tradisional untuk memperkenalkan budaya khas Indonesia pada umumnya,” jelas Kepala SMA Kristen 1 Salatiga

Selain ikut belajar di Hamburg, Ibu Kris berharap kesempatan itu benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh anak-anak dan guru pendamping, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi dan mendapatkan ilmu baru dari sebuah negara maju. (ss/ss)

Pameran Fotografi Salatiga dalam Bingkai Kebangsaan



Pameran Foto di Kantor DPRD Kota Salatiga

Salatiga Fotografi dan Komunitas Migunani mengadakan Talkshow dan Pameran Fotografi dengan tema Salatiga dalam Bingkai Kebangsaan di Rumah Rakyat Gedung DPRD Kota Salatiga 19-20/6.

Acara dibuka oleh Sekretaris DPRD Kota Salatiga Sri Wityowati, SE mewakili Ketua DPRD Kota Salatiga. Berkenan hadir dalam pembukaan

tersebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga Sri Danudjo, Perwakilan Salatiga Fotografi dan pembicara talkshow. Dan dimeriahkan dengan pagelaran Reog dari Gamol Salatiga

Dalam sambutan tertulisnya Bung Teddy menyampaikan apresiasi yang tinggi panitia penyelenggara dan berpesan agar para senior fotografer untuk bisa menularkan ilmunya kepada para generasi muda.

Rahmat Wahjoe, salah satu aktifis dari Salatiga Fotografi dalam sambutan pengantarnya mengatakan dalam pameran ini akan ditampilkan hasil karya para fotografer baik yang senior maupun pemula bahkan ada yang masih duduk di bangku SD dan SMP.

Anak-anak masih polos dan mereka merekam apa yang mereka lihat tanpa editing. Kita bisa melihat Salatiga dari sudut pandang anak-anak,” jelas Rahmat Wahyoe

Tidak kurang 60 buah hasil karya fotografi dipamerkan dalam kegiatan ini, yang merupakan hasil dari mengikuti acara hunting foto di sepanjang jalan Diponegoro, Jendral Sudirman dan kampung wisata Pancuran. *(dev/ss)*

Salatiga Kembali Meraih WTP

Pemerintah Kota Salatiga kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga tahun anggaran 2017.

Penyerahan opini WTP dilakukan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Jateng Hery Subowo kepada Walikota Salatiga Yulianto, SE.MM di dampingi Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga Ir. Hj Diah Sunarsasi di Kantor Perwakilan BPK Semarang pada Jumat 28 Mei 2018.

Hadir dalam acara tersebut Sekda Kota Salatiga Drs. Fakruroji, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Salatiga Adi Isnanto, S.Sos.M.Si, Inspektur Kota Salatiga Ir. Kurnia Hardjanti, M.Si. Selain Kota Salatiga diserahkan juga Opini WTP untuk 26 entitas di Jawa Tengah.

Hery Subowo dalam sambutannya mengatakan untuk tahun ini ada daerah yang naik kelas menerima Opini WTP dan namun masih ada daerah di Jawa Tengah yang masih menerima Opini



Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LKPD 2017

WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Namun secara keseluruhan tahun 2017 ini lebih banyak daerah yang mendapatkan opini WTP daripada yang WDP ini merupakan prestasi tersendiri bagi kabupaten kota di Jawa Tengah karena ada peningkatan jumlah penerima opini WTP. *(uj/ss)*

Festival Anak Sholeh Indonesia Tingkat Kota Salatiga



Foto: ist

Festifal Anak Sholeh Tingkat Kota Salatiga.

Badan Koordinasi Taman Pendidikan Quran (Badko TPQ) Kota Salatiga menggelar Festival Anak Sholeh Indonesia (Fasi) tingkat Kota Salatiga tahun 2018 yang berlangsung di Kampus I IAIN Salatiga, Minggu 25 Maret 2018.

Fasi ke-8 tahun ini diikuti sekitar 1.500 peserta dari seluruh TPQ yang ada di Kota Salatiga dan memperlombakan delapan cabang lomba. Yakni adzan dan iqomah, lagu islami/nasyid,

mewarnai dan melengkapi gambar, menggambar, kaligrafi, praktik shalat jamaah (beregu), dan puitisasi Alquran (beregu).” Kata Khusnul Kirom.

Adapun juara I puitisasi Alquran diraih TPQ Al Hasan, juara II TPQ Al Ikhlas Ledok, dan juara III TPQ Nur Hidayah. Juara I shalat berjamaah diraih TPQ Al Ikhlas Ledok, juara II TPQ Nurul Hikmah Macanan, dan juara III TPQ Al Hasan.

Juara I Azan diraih TPQ Atthohiriyah (Faruq), juara II TPQ Al Ikhlas Ledok (Rifqi), juara III TPQ Arridho (Zulfar). Juara I Nasyid diraih TPQ Baitul Izzah (Meyla), juara II TPQ Al Amin Bancaan (Izzatur), juara III TPQ Al Jalil (Sabina).

Juara I Kaligrafi diraih TPQ Al Hijrah (Salma), juara II TPQ Assyifa (Bilqis), juara III TPQ Mawalid (Rachelli). Juara I mewarnai gambar diraih TPQ Al Lubawi (Adikara), juara II TPQ Nahdhotus Subbhan (Aqila), juara III TPQ Ar Ridho (Maritsa).

Juara I melengkapi gambar diraih TPQ Al Amin (Afra), juara II TPQ Al Atiq (Kartika), dan juara III TPQ Nahdhotus Subbhan (Khansa). Kemudian juara I menggambar diraih TPQ Nurul Hidayah (Khairina), juara II TPQ Al Atiq (Salsabila), dan juara III TPQ At Thohiriyah (**Jovansyah/ss**).

Pengurus KONI dilantik Ketua DPRD Menerima Penghargaan

Ketua DPRD Teddy Sulistio, SE, menerima penghargaan sebagai salah satu orang yang berdedikasi terhadap pengembangan prestasi olahraga di Salatiga saat menghadiri Pelantikan Pengurus KONI Kota Salatiga periode 2018-2022 di Pendopo Pakuwon Pemerintah Kota Salatiga, Rabu, 02/6 2018.

Selain Ketua DPRD diserahkan pula penghargaan kepada Walikota Yuliyanto, keluarga almarhum John Manoppo (mantan Walikota), Sugkowo Sudiarto (Sepak Bola), keluarga almarhum Alwi Mugianto (pelatih Atletik), Bambang Siswoyo (pelatih Atletik), Yon Daryono (pelatih Atletik), HS. Monginsidi (pelatih Karate), dan Amin Pambudi (pelatih Judo).

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Tengah, Brigjen (Purn) Subroto, MM dan dihadiri oleh Pengurus KONI Jawa Tengah, Walikota Salatiga Yuliyanto, SE, MM, Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistyo, SE, Jajaran Forkopimda Salatiga, jajaran Pengurus KONI dan tamu undangan.

Dalam sambutannya Brigjen (Purn) Subroto,



Ketua DPRD saat menerima penghargaan dari KONI.

MM mengatakan bahwa pelantikan Pengurus KONI Kota Salatiga harus mampu meningkatkan semangat juang meraih prestasi, terlebih Kota Salatiga merupakan gudang atlet dan prestasi olahraga.

“Saya meminta kepada Walikota Salatiga Yuliyanto dan Ketua DPRD Salatiga Teddy Sulistio serta yang hadir agar mendukung program kerja KONI Kota Salatiga.” Kata Subroto. (**pris/ss**)

Riawan Woro Endartiningrum Dilantik Menjadi Wakil Ketua DPRD Salatiga



Riawan Woro Endartiningrum saat diambil sumpah jabatan selaku Wakil Ketua DPRD Salatiga.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga, Senin (2/7) telah melantik Wakil Ketua DPRD Riawan Woro Endartiningrum yang sebelumnya sebagai anggota Komisi B dan menggantikan Ir. Hj. Diah Sunarsasi yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga.

Acara yang berlangsung di Ruang Bhinneka Tunggal Ika DPRD Salatiga tersebut dihadiri Ketua

DPRD M. Teddy Sulistio, SE, Wakil Ketua M. Fathurrahman, SE, Walikota dan Wakil Walikota, segenap unsur Forkopimda serta Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) se Kota Salatiga.

Menurut Sekretaris DPRD Kota Salatiga Sri Wityowati, SE, pengucapan/janji penggantian antarwaktu Wakil Ketua DPRD Salatiga masa keanggotaan 2014-2019 tersebut merupakan usulan internal Partai Gerindra. Partai Gerindra telah mengajukan usulan bulan April lalu dan kemudian diproses oleh sekretariat.

Usulan kepada Ketua DPRD tersebut kemudian diajukan kepada Walikota Salatiga dan Gubernur Jawa Tengah, dan pada tanggal 25 Mei 2018 Surat Keputusan (SK) pergantian Wakil Ketua DPRD Salatiga dari Gubernur turun.

Dijelaskan beliau bahwa setelah dilantik, maka secara otomatis hak-hak sebagai wakil ketua dewan akan melekat.

"Saya sudah konsultasi ke pusat, setelah dilantik hak-haknya melekat, karena memang usulan pergantian tersebut dari partainya, sehingga setelah dilantik hak-haknya langsung melekat," kata Ibu Setwan. **(ss/ss)**

Halal Bihalal DPRD Berbuat Maksimal untuk Rakyat Bersama Pak Walikota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga mengadakan acara Halal bi Halal 1439 H di Halaman Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Senin 09/07/2018.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPRD Kota Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE beserta anggota, Walikota Salatiga Yulianto SE, MM, Kapolres Salatiga AKBP. Yimmy Kurniawan, Ketua PN Salatiga Hj. Widarti, SH, MH, Sekretaris Daerah beserta jajaran OPD se Kota Salatiga. Hadir juga tokoh Masyarakat dan Agama serta tamu undangan.

Pembicara dalam acara tersebut Ketua MUI Kota Salatiga KH. Dr. Saefudin Zuhri, sedangkan pembaca ayat suci Al Qur'an KH. Imron, S.Ag, M.Pd. Halal Bihalal kali ini dihibur dengan alunan musik dari artis-artis Anggun Entertainment.

Ketua DPRD Kota Salatiga, M. Teddy Sulistio, SE dalam sambutannya mewakili segenap anggota mengucapkan Minal Aidzin wal Faidzin mohon maaf lahir dan batin, jika ada kekurangan



Ketua DPRD bersama KH. Nasir Tingkir Tengah Salatiga.

selama mengabdikan, melayani dan ngesruhi masyarakat Salatiga.

"Masa bakti kami tinggal satu tahun, mudah-mudahan satu tahun ini kami bisa berbuat maksimal untuk masyarakat bersama Pak Wali dan stakeholder lainnya". Kata Bung Teddy. **(uj/ss)**

Adi Riafik (24) nama pria itu, dia adalah pekerja Tenaga Harian Lepas Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga yang memang ditugasi untuk membersihkan sampah sekaligus menyapu jalan di seputar Jalan Diponegoro hingga Jalan dekat Roncali Salatiga.

Terik matahari dan guyuran hujan serta polusi udara tidak membuat Adi Riafik (24) patah arang untuk mengais rezeki menghidupi anaknya yang masih berusia 1 tahun.

"Saya sudah hampir empat tahun bekerja jadi tukang sapu," kata Adi saat ditemui di halte depan UKSW, Salatiga, Rabu (11/7).

Pengalaman hidup begitu berarti untuk bapak dari 1 anak itu. Adi Riafik menuturkan, pekerjaan

Adi Riafik Belajar Hidup dari Daun dan Sampah

yang ia lakoni memang baru sekitar hampir 4 tahun ia jalani. Dahulu, Adi Riafik hanya sebagai pegawai serabutan biasa, kemudian melamar pekerjaan sebagai tukang sapu Dinas Lingkungan Hidup untuk membantu perekonomian keluarga serta membiayai anaknya yang masih balita.

Kebetulan saat itu, perusahaan tenaga kerja tempat ia bernaung saat ini membutuhkan tukang sapu untuk membersihkan sepanjang Jalan Diponegoro Salatiga yang bersedia bekerja sejak pukul 06.00 WIB hingga pukul 11.30 WIB membersihkan sampah daun atau sampah non organik yang berserakan di pinggir jalan atau sengaja dibuang orang yang tidak bertanggung jawab.

Belajar dari Daun dan Sampah

Daun, sampah plastik, kuman dan kotor merupakan rejeki buat Adi Riafik setiap hari. Adi begitu panggilannya mengatakan, bahwa ia bersyukur menjalani pekerjaan seperti saat ini. Meski pendapatannya boleh dibilang kecil dibanding dengan tenaga yang ia keluarkan serta resiko pekerjaan yang ia jalani, namun Adi tetap ikhlas menjalani prosesi hidup sebagai tukang sapu.

Jika Adi masuk kerja setiap bulannya tanpa



Foto: Intan

Adi Riafik saat membersihkan jalanan dari sampah dan daun yang jatuh.

absen setiap hari, gaji yang ia terima sebesar Rp 1.000.000. Perhari gaji Adi dibayar Rp 35 ribu tanpa uang makan atau uang lembur.

"Ya alhamdulillah ada aja, untuk suka duka paling kalau lagi nyapu ada orang titip sampah," ucapnya.

Meski hidup begitu keras, namun Adi coba menjalani dengan sabar dan ikhlas. Dia mengatakan, meski harus menyapu sampah dedaunan pohon yang ada dipinggir jalan, menurutnya itu adalah rezeki. Tuhan menjatuhkan daun ke jalan dan disapu untuk mendapatkan sekadar rupiah penyambung hidup.

"Kalau dibilang kurang, manusia pasti akan kurang terus, ya kita cukup-cukupi," ujar Adi Riafik yang selalu ikhlas menjalani profesinya sebagai tukang sapu jalan. (*is/ss*)

TEBAK WAJAH JIWARAGA 38

KETENTUAN MENEBAK :

1. Susunlah penggalan foto ini dikartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh.
2. Sebutkan identitas namanya.
3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwara yang telah disediakan.
4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwara, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jl. Letjend. Sukowati No. 51 Salatiga.
5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim serta Nomor Telepon.
6. Jawaban diterima Redaksi Majalah Jiwara paling lambat tanggal 25 September tahun 2018.
7. Akan diundi 5 (lima) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah senilai Rp. 100.000.
8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwara Edisi II Tahun 2018.
9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi Majalah Jiwara dengan menyertai fotocopy identitas diri. (ss)



KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA



H. SUNIPRAT

PEMENANG TEBAK WAJAH JIWARAGA 37

1. **Ika Yunita Astanti**
Krajan RT. 05 / 01 Kel. Dukuh,
Sidomukti Salatiga
2. **Rizky hidayatul Victor**
Jl. Nakula sadewa III No.20A
Kembang Arum RT.01 RW.03 Kel. Dukuh
Sidomukti - Salatiga
3. **Ardiyana Yuri Prasetyo**
Tegalombo RT.08 RW.03, Kel. Blotongan
Sidorejo - Salatiga
4. **Rahayuningsih**
Randuares RT.01 RW.01 Kel.
Kumpulrejo, Argomulyo - Salatiga
5. **Kusno**
Cabean RT.05 RW.01 Kel. Mangunsari,
Sidomukti - Salatiga



Foto: dihyo

Wakil Ketua DPRD menerima kenang-kenangan dari DPRD Kota Pekalongan.

DPRD Kota Pekalongan ke Salatiga



Kunjungan dari DPRD Kota Pekalongan.

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga M. Fathur Rahman, SE.,MM. bersama Ir. Hj. Diah Sunarsasi menerima Kunjungan Kerja DPRD Kota Pekalongan dan didampingi beberapa anggota Komisi A DPRD Salatiga, Selasa (10/04/2018).

Peserta kunjungan yang diterima di ruang Bhinneka Tunggal Ika gedung Sekretariat DPRD Kota Salatiga tersebut juga dihadiri anggota Komisi A DPRD Nono Rochana, S.Ag.

Turut hadir Setwan Kota Salatiga Sri Wityowati, SE bersama Kabag. Persidangan Agung Susetyo, SH. Pada prinsipnya DPRD Kota Salatiga menyambut baik dan terbuka untuk acara sharing pendapat tersebut. Sesuai dengan program kerja DPRD Kota Pekalongan tahun 2018, DPRD Kota Pekalongan Studi Banding ke DPRD Kota Salatiga guna melihat sejauhmana kegiatan DPRD Kota Salatiga berkenaan dengan adanya tim ahli.

Wakil Ketua DPRD Kota Salatiga, M. Fathur Rahman, SE. MM mengungkapkan bahwa selama ini DPRD Kota Salatiga selalu melibatkan tim ahli, sehingga sangat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

“Kita dibantu dengan aplikasi dari pihak tim ahli, sehingga kita tidak harus membuka buku-buku yang sangat tebal, melainkan mencermati langsung dari aplikasi yang telah dipaparkan oleh tim ahli kita” tutur pak Maman. (ss/ss)

